

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____ *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

_____ *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006.

Cohen dalam Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, 2005.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Dik-dik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara norma dan realita*, dikutip dari Zvonimir Paul

- Separovic. *Victimology, Studies of Victims*, Zagreb, 1985. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* , PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Lamintang dan Siromangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Sinar Grafika, Bandung, 2005.
- _____ *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2005.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- NI'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Ralph de sola, *Crime Dictiniory* , New York, facts on file publication, 1998.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satjipto Raharjo, *Polisi Dalam Masyarakat*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005.

Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Syahrial Martanto Wiryawan, Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. ICW, Jakarta, 2007.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zulkarnaen Koto, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang *Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*

TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang *Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang *Pertahanan dan Keamanan Negara*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *HAM*.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang *Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi Dan Korban*.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang *Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang *Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.*

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang *Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Sistem Informasi Penyidikan.*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.*

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1,2,3,4 Tahun 2014 tentang *Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.*

C. Internet

Sanjaya Yasin, <http://www.sarjanaku.com/2010/10/makna-setia-alinea-dalam-pembukuan-uud.html> di akses tgl 02 Januari 2016 pukul 21.00 WIB.

www.lpsk.com, diunduh tanggal 30 Maret 2016 pukul 21.00 wib

www.wikipedia.com diunduh tanggal 20 April 2016 pukul 21.00 wib

<http://www.wahyubram.wmk.web.id/index.php?view=article&catid=3:informasi-umum&id=3:bentuk-ideal-surat-pemberitahuan-perkembanganhasil-penyidikan-sp2hp-> dinduh tgl 25 april 2016 pukul 21.00 wib